



**Ranah Research:**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613    ranahresearch@gmail.com    <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6)  
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Evaluasi Terhadap Program Desa Cerdas di Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan dengan Perspektif Teori Strukturalis Adaptif (Studi Komunikasi Pembangunan Melalui Pendekatan Poststrukturalis)

Salis Fitria<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, [salisfitria@student.ub.ac.id](mailto:salisfitria@student.ub.ac.id)

Corresponding Author: [salisfitria@student.ub.ac.id](mailto:salisfitria@student.ub.ac.id) <sup>1</sup>

**Abstract:** *This research departs from a structuralist approach that is identical to the modernist project. The researcher's position is in critical poststructuralism, namely the fourth approach to development communication. There is awareness of the need for a more participatory approach in government programs. Until now, top down government programs still dominate. The strategy used is usually created by the highest authority and then passed on to lower levels. The Smart Village Program is a state initiative program. This program was initiated by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Kemendesa PDRT). Nationally Smart Villages are not participatory. Stakeholders in Kertagena Tengah Village implement the concept of a top-down approach. However, on the other hand, based on the results of the FGD, the community wants government programs that are more participatory. The community is involved in the planning, implementation, monitoring and evaluation and even development processes. Participatory communication can support sustainability. Researchers identified the experiences and understanding of village communities regarding the Smart Village program in Central Kertagena, Pamekasan Regency. The findings show weak aspects, due to the existence of power from the center. There is a duality of structure at work in the Smart Village program. The government's position is to become one of the entities, no longer dominant. Marked by the emergence of groups, new structures in the Smart Village program.*

**Keyword:** *Smart Village Program, Central Kertagena Pamekasan Regency, Participatory Communication Model*

**Abstrak:** Penelitian ini berangkat dari pendekatan strukturalis yang identik melalui proyek modernis. Posisi peneliti berada di kritis poststrukturalis, yaitu pendekatan keempat dalam komunikasi pembangunan. Terdapat kesadaran perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dalam program pemerintah. Sampai saat ini, program pemerintah yang bersifat *top down* masih mendominasi. Strategi yang digunakan biasanya dibuat oleh otoritas tertinggi lalu diteruskan ke tingkat yang lebih rendah. Program Desa Cerdas merupakan program inisiatif negara.

Program ini di gagas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Desa Cerdas secara nasional tidak partisipatoris. *Stakeholders* di Desa Kertagena Tengah melaksanakan dengan konsep pendekatan *top-down*. Namun disisi lain, berdasarkan hasil FGD, masyarakat menginginkan program-program pemerintah yang lebih partisipatif. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bahkan pengembangan. Komunikasi partisipatif dapat mendukung keberlanjutan. Peneliti mengidentifikasi pengalaman dan pemahaman masyarakat desa tentang program Desa Cerdas di Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. Temuan menunjukkan aspek-aspek lemah, karena adanya *power* dari pusat. Terdapat dualitas struktur yang bekerja dalam program Desa Cerdas. Posisi pemerintah menjadi salah satu entitas, bukan lagi dominan. Ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok, struktur baru dalam program Desa Cerdas.

**Kata Kunci:** *Smart Village Program, Central Kertagena Pamekasan Regency, Participatory Communication Model*

---

## PENDAHULUAN

Terdapat kesadaran perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dalam program pemerintah. Sampai saat ini, program pemerintah yang bersifat *top down* masih mendominasi. Strategi yang digunakan biasanya dibuat oleh otoritas tertinggi lalu diteruskan ke tingkat yang lebih rendah. Literatur menyebutkan, pendekatan yang lebih partisipatif dapat mendukung keberlanjutan sebuah program pembangunan. Penelitian Chitranshi & Dhar (2018) mengkritik pendekatan tradisional *top-down* terhadap komunikasi pembangunan. Chitranshi & Dhar berpendapat perspektif ini membatasi potensi strategi komunikasi yang inklusif dan partisipatif dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, kedua peneliti menyarankan: (1) menggunakan pendekatan partisipatif; (2) pengakuan atas pengetahuan lokal; (3) membangun kepercayaan dan hubungan yang tulus dengan komunitas yang terpinggirkan; (4) menantang dinamika kekuasaan, bahwa pendekatan tradisional yang bersifat *top-down* sering kali melanggengkan ketidaksetaraan dan marjinalisasi; (4) fokus pada pemberdayaan.

Menurut Srampickal (2006) keputusan dan program pembangunan model *top down*, sering kali ditentukan oleh pihak luar tanpa melibatkan komunitas lokal. Peneliti menyarankan pendekatan komunikasi partisipatif yang inklusif, melibatkan semua anggota komunitas, termasuk kelompok marginal. Setiap suara harus didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah pemberdayaan komunitas sehingga meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri mereka. Program pembangunan lebih mungkin untuk berkelanjutan karena mereka didasarkan pada kebutuhan dan keinginan nyata dari komunitas. Srampickal menyarankan berbagai metode dan teknik untuk implementasi komunikasi partisipatif, seperti *workshop*, diskusi kelompok, teater rakyat, dan media komunitas. Metode-metode ini harus dirancang untuk mendorong partisipasi aktif dan dialog terbuka. Sedangkan fasilitator berperan penting untuk membantu komunitas mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang inklusif dan adil.

Jacobson (2003) memandang komunikasi untuk perubahan sosial mengacu pada komunikasi pembangunan. Kajian ini melepaskan diri dari tradisi modernisasi dan berfokus pada komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif dapat dilihat dari banyak aspek, salah satunya melalui teori tindakan komunikasi Jürgen Habermas, yang berpendapat bahwa dalam jenis tindakan harus menjadi dasar dalam menentukan partisipasi. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang bebas dari dominasi dan berorientasi pada pemahaman bersama. Teori ini juga melihat komunikasi sebagai cara untuk mencapai konsensus dan pengertian yang timbal balik melalui dialog yang rasional. Adapun prinsip-prinsip utamanya yaitu validitas

klaim (*truth, rightness, and sincerity*) dalam komunikasi untuk membangun dialog yang jujur dan terbuka.

Selanjutnya Melkote & Singhal (2021) menyebutkan empat pendekatan utama dalam komunikasi pembangunan yang berafiliasi dengan jenis paradigmanya, yaitu pendekatan transfer teknologi (*transfer of technology*) yang berafiliasi dengan paradigma modernisasi (*modernization paradigm*). Paradigma ini memandang komunikasi sebagai proses pemberitaan tentang inovasi. Selanjutnya, komunikasi partisipatoris (*participatory approaches*) yang berhubungan dengan pendekatan pemberdayaan (*empowerment approaches*), dan *imperative* keadilan sosial (*social justice imperative*).

Menengok sejarah kemunculannya, pasca perang dunia kedua, tahun 1950-an teori modernisasi mendominasi. Teori ini melihat pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi (Rogers, 1978; Servaes, 2008). Oleh karena itu, fokus pembangunan lebih bersifat *top-down*, hegemonisasi, terarah dan kumulatif, ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah, progresif, imanen atau berasal dari sistem sosial itu sendiri. Masalah utama pembangunan bertautan pada pertanyaan ‘menjembatani kesenjangan’ dan ‘mengejar ketinggalan’ (Servaes, 2008). Sebagai akibatnya, sarana modernisasi menghasilkan transfer modal, ideologi, teknologi, dan pengetahuan secara besar-besaran.

Tokoh-tokoh seperti Daniel Lerner (1958), Everett M. Rogers (1962, 1976) dan Wilbur Schramm (1964) mengidentifikasi media massa sebagai mekanisme yang efektif untuk “modernisasi” masyarakat (Melkote & Singhal, 2021). Pada era ini, banyak peneliti dan pengambil keputusan percaya bahwasannya informasi yang disebarluaskan melalui media massa dapat menentukan proses pembangunan (Stover, 2018). Pendekatan dominan gagal dalam memperoleh dukungan berkelanjutan dari masyarakat. Penyebabnya karena belum membantu mengentaskan persoalan kemiskinan di negara-negara berkembang.

Schramm dan W. Lee Ruggles dalam (Antoni, 2004), mengklaim bahwa sejak tahun 1961, urbanisasi tidak lagi menjadi acuan pokok pembangunan dan pertumbuhan. Hal itu disebabkan penyebaran media elektronik, khususnya radio, serta percepatan transportasi ke desa. Selain itu, Schramm juga mendeteksi sejak dini, bahwa media baru tidak mengubah masyarakat, hanya menyediakan sarana yang berbeda bagi masyarakat untuk memecahkan masalahnya (Singhal, 1987). Teori modernisasi dianggap lemah karena hanya mampu menjelaskan kasus Turki dengan akurat, namun sangat berbeda dengan negara lain seperti halnya Lebanon, Mesir, Suriah, Yordania dan Iran (Shah, 2011). Madjid Tehranian memaparkan dominasi dalam proyek modernisasi melahirkan sekelompok pihak yang menguasai sehingga memunculkan gerakan perlawanan kalangan penganut kepercayaan tradisional, agama, dan lainnya (Antoni, 2004). Pandangan tersebut memunculkan pertentangan yang berhubungan dengan ketergantungan (*dependency*).

Menurut Beltrán (2008), teori dan praktik komunikasi pembangunan mulai dipertanyakan di Amerika Latin pada awal tahun 1970-1980an. Beltrán mengkritik model-model komunikasi seperti model SMCR yang disinyalir satu arah (monologis). Schiller (2018) menyoroti negara-negara maju mendominasi aliran informasi global dan mengendalikan media internasional. Dallas Walker Smythe juga menunjukkan keprihatinan, bagaimana ketergantungan Tiongkok pada Barat telah beralih ke kapitalisme (Zhao & Hong, 2023). White (2004) mendukung pemikiran Servaes (2008), pentingnya memutuskan hubungan ketergantungan pada penyedia sumber daya pembangunan. Sebagai akibat terjadinya krisis dan tekanan ketergantungan antar wilayah dan negara, muncul perubahan baru mengenai pembangunan dan perubahan sosial. Pergeseran paradigma berganti arah menjadi paradigma partisipatori, mengedepankan identitas budaya lokal dan multidimensi (*multidimensionality*).

Penelitian ini berangkat dari pendekatan strukturalis (positivisme) dan menggabungkan pendekatan kritis dan poststrukturalisme. Mumby (1997) mendukung penggabungan antara poststrukturalisme dan teori kritis sebagai tradisi intelektual yang berbeda. Sebagaimana diketahui Desa Cerdas adalah salah satu proyek modernis yang tergolong penelitian

administratif. Peneliti secara kritis modernis melihat bagaimana struktur sosial dan ekonomi memengaruhi proses komunikasi pembangunan. Selain itu, peneliti mempertanyakan asumsi dan narasi dominan dalam komunikasi pembangunan. Disaat bersamaan peneliti memperkaya pemahaman dengan pendekatan poststrukturalis. Pengetahuan dan kekuasaan saling terkait secara intrinsik. Apa yang dianggap benar bergantung pada "permainan kebenaran" yang mengatur kemungkinan klaim pengetahuan. Selain itu, peneliti memaparkan komunikasi sebagai politik. Bagaimana komunikasi dan kekuasaan berinteraksi untuk mengatur siapa yang dapat berpartisipasi secara bermakna dalam dialog.

Berikutnya adalah penjelasan penelitian yang menggabungkan beberapa pendekatan. Splichal & Mance (2018) menunjukkan teori kritis dan penyelidikan sosial empiris dapat berdampak, meskipun pendekatan kritis masih bersifat perifer (alat tambahan). Selanjutnya Kraidy (2018) menyebutkan bagaimana tantangan politik, ekonomi, dan tantangan lain terhadap kehidupan, mendorong agar para peneliti memperluas definisi "kritis" yang dimaksud. Moore (2017) mengatakan perlunya integrasi teori kritis. Morris (2003) menggali dua model utama dalam komunikasi pembangunan: difusi dan partisipatif. Analisis komparatif Morris mengungkapkan bahwa meskipun model difusi dan model partisipatif mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeda, terdapat pengakuan yang semakin besar terhadap nilai pengintegrasian unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Hemer & Tufte (2012) menggunakan pendekatan kritis dan reflektif untuk mengkaji lanskap komunikasi pembangunan (*Communication Development/ ComDev*). Kajian ini terus berkembang dalam konteks globalisasi dan kajian media.

Penelitian ini mendekati pemikiran DeSanctis & Poole (1994) tentang *adaptive structuration theory (AST)*. Teori ini merupakan pengembangan dari teori strukturasi Giddens (1984). AST menjelaskan bagaimana teknologi komunikasi diterapkan dan diadaptasi oleh masyarakat perdesaan dan bagaimana hal itu memengaruhi praktik pembangunan. AST dapat menggambarkan interaksi antara teknologi informasi canggih, struktur sosial, dan interaksi manusia (DeSanctis & Poole, 1994). AST fokus pada penggunaan teknologi informasi canggih dalam kelompok dan organisasi (Canary & Tarin, 2017). Dalam AST juga dijelaskan tentang adanya dualitas struktur, yaitu struktur dan tindakan agen saling berkaitan dan memengaruhi. Mereka saling membentuk dan mempengaruhi secara simultan.

Berikutnya, penelitian ini memiliki pandangan bahwa program Desa Cerdas merupakan program inisiatif negara yang dilakukan secara *top-down*. Program oleh Kementerian Desa (Kemendesa) yang sifatnya sentralistik dan vertikal. *Power* atau kekuasaan terpusat di elit, yaitu Kemendesa. Kemendesa sebagai instansi pemerintah membuat kebijakan besar strategis nasional melalui program Desa Cerdas. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelenggara program di Desa Kertagena Tengah, program Desa Cerdas dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang ada. Program meliputi pelatihan desain (kemasan produk), pemanfaatan website, *digital marketing*, foto produk, dan pembuatan konten digital berupa video. Harapannya adalah meningkatkan kapasitas warga, memberikan dorongan inovasi di desa, inisiatif melalui program pelatihan yang muaranya kepada literasi digital.

Berdasarkan *prelimenery research*, pada dasarnya, pemerintah desa menjalankan program Desa Cerdas sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku dari pusat. Sayangnya, program Desa Cerdas tidak mendukung upaya partisipasi. Pertama bisa dilihat dari administrasi yang terlalu lama. Diketahui desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan terpilih sebagai Desa Cerdas berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penetapan 1000 Desa Lokasi Desa Cerdas Fase II (Kemendesa, 2022). Program ini didukung keberadaan Duta Digital sebagai fasilitator desa yang dilantik oleh pusat pada tahun yang sama yaitu, bulan Juli tahun 2022. Keberadaan Duta Digital dan program Desa Cerdas setidaknya berlaku selama dua tahun. Program baru benar-benar berjalan satu tahun kemudian.

Kedua, produksi partisipasi dari program dipengaruhi oleh struktur, yang berbeda antara masyarakat dan elit. Hal itu akan menyebabkan sulitnya partisipasi. Ada diskursus dari pembuat program Desa Cerdas memaknai literasi digital hanya sebagai pemanfaatan teknologi digital. Hal itu berdasarkan hasil wawancara bersama peserta program Desa Cerdas pada 21 Desember 2023, tujuan program Desa Cerdas hanya dimaknai sebagai wadah masyarakat yang memiliki bakat minat dari segala bidang, khususnya pemuda, padahal elit mengatakan tujuan program adalah mencapai literasi digital. Dari sini dapat digarisbawahi, ada ketidaksamaan makna terkait tujuan program Desa Cerdas antara penyelenggara dan masyarakat desa sebagai penerima manfaat program.

Tonggak literasi digital adalah penguasaan ide bukan hanya keterampilan menggunakan komputer dan teknologi informasi (Leaning, 2019). Masyarakat desa mampu memiliki serangkaian kemampuan untuk memahami, mengevaluasi serta mengintegrasikan informasi dalam berbagai format. Bukti empiris peneliti temukan melalui website desa, yang dibuat oleh penyelenggara program tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat desa dalam hal ini tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Sosialisasi launching website desa & layanan mandiri warga-pun dimunculkan. Program ini tergolong lemah, karena berpotensi tidak menjawab kebutuhan dari masyarakat.

Berdasarkan Handayani et al., (2015), di Indonesia komunikasi pembangunan belum menjadi kajian yang cukup berkembang namun bisa menelusurinya dari dua pakar Ilmu Komunikasi yang memfokuskan pada kajian tersebut, yaitu Prof. M. Alwi Dahlan dan Prof. Santoso Hamijoyo. Pemikiran M. Alwi Dahlan fokus pada pemerataan akses informasi, kualitas SDM, serta regulasi informasi untuk pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Penelitian ini lebih mendekati pemikiran Santoso Hamijoyo yang tergolong modernis-partisipatoris karena menitikberatkan pada aspek manusia juga keterlibatan masyarakat dalam sebuah proyek pembangunan.

Paradigma kontemporer menegaskan bahwa untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan, proses standar haruslah mempertimbangkan kondisi lokal, ketidakpastian, dan kompleksitas sosial dan budaya (Herington et al., 2017). Pendekatan yang lebih partisipatif dalam komunikasi pembangunan dan perubahan sosial, misalnya Freire (1970), Servaes & Malikhao (2005), Servaes (2008), Jacobson (2003), Wilkins & Mody (2001), Tufte & Mefalopulos (2009), S. Melkote & Steeves (2015), dan lainnya.

Komunikasi partisipatif adalah pendekatan dialogis dan horizontal dalam komunikasi dan pembangunan (Tufte & Mefalopulos, 2009). Model ini menekankan adanya kolaborasi timbal balik di seluruh tingkat partisipasi dengan titik tolaknya haruslah masyarakat (Servaes, 2008). Model partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dalam kegiatan pembangunan dari awal hingga akhir dengan tujuan utama untuk mendorong perubahan sosial (Servaes, 2008). Jika masyarakat lokal tidak dilibatkan, maka dapat memicu terjadinya kegagalan komunikasi untuk mencapai perubahan, lebih lanjut akan mengakibatkan pemahaman yang terbatas atau kontradiktif terhadap isu (Tufte & Mefalopulos, 2009).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan sebelumnya. Chitranshi & Dhar (2018) mempertimbangkan kembali hubungan antara komunikasi dan pembangunan. Chitranshi & Dhar menantang pendekatan konvensional yang menggunakan teknologi komunikasi semata-mata untuk pembangunan, dan mengusulkan agar pembangunan memfasilitasi komunikasi. Hal itu dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan kritis tentang bagaimana komunikasi dapat mendorong pembangunan dan sebaliknya, serta melibatkan suara-suara kelompok yang terpinggirkan.

Menurut Srampickal (2006), strategi komunikasi yang efektif untuk mendorong perubahan sosial di negara-negara berkembang mencakup penggunaan komunikasi partisipatif, media akar rumput, dan keterlibatan masyarakat. Kampanye yang melibatkan kelompok lokal dalam pembuatan dan analisis pesan telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi,

dengan dampak perubahan perilaku berkisar antara 3% hingga 14%. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti radio komunitas dan video partisipatif, dapat meningkatkan jangkauan dan dampak.

Peneliti Jacobson (2003) membahas pergeseran dari metode penelitian tradisional ke pendekatan penelitian komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif mengutamakan keterlibatan lokal dan bertujuan untuk perubahan sosial. Jacobson menekankan bahwa penelitian tidak hanya harus menghasilkan temuan yang objektif. Lebih dari pada itu memfasilitasi tindakan kolektif dan pemberdayaan dalam masyarakat. Peneliti menyarankan bahwa penelitian partisipatif yang efektif memerlukan eksplorasi konseptual dan empiris untuk memahami dampaknya terhadap keterlibatan masyarakat dan transformasi sosial.

Selanjutnya, Khumalo (2021) menggunakan pendekatan komunikasi pembangunan partisipatif dan kohesi sosial. Studi ini mengadopsi penggabungan teori pembangunan partisipatif dan komunikasi pembangunan, yang menekankan pentingnya pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan peran komunikasi dalam memfasilitasi perubahan sosial. Khumalo berfokus pada aspek relasional kohesi sosial dalam konteks klub pendengar radio komunitas, menyoroti pentingnya modal sosial, inklusi, dan nilai-nilai bersama dalam mendorong upaya kolektif menuju peningkatan kehidupan masyarakat.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peserta program Desa Cerdas Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan mengalami dan memahami manfaat program dalam kehidupan sehari-hari mereka?

## METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Penelitian ini terbatas untuk mengevaluasi program Desa Cerdas di Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi profil desa Cerdas yang diperoleh melalui perangkat desa dan *website* desa, serta *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik penentuan informan dilakukan dengan analisis *stakeholders*. Pertama-tama peneliti melakukan FGD dengan masyarakat penerima manfaat sebanyak 10 peserta. Analisis *stakeholder* kedua bersama seluruh pemangku kepentingan meliputi: duta digital, kader digital, masyarakat, RKDD, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, bumdes, dan karang taruna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian komunikasi pembangunan (*development communication*), *Adaptive Structuration Theory* (AST) oleh DeSanctis & Poole (1994) dapat memahami bagaimana Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) digunakan, diadaptasi, dan diterapkan. AST berpendapat teknologi informasi yang maju memicu proses struktural adaptif. Seiring waktu proses tersebut menyebabkan perubahan dalam aturan dan sumber daya yang digunakan organisasi dalam interaksi sosial. Elemen-elemen dan pembahasan teori sebagaimana berikut:

### 1. Agen

Agen adalah penerima pasif teknologi, juga secara aktif membentuk penggunaan berdasarkan pemahaman dan konteks mereka (DeSanctis & Poole, 1994). Berdasarkan hasil FGD, setidaknya ada 8 agen yang terlibat dalam program Desa Cerdas. Berdasarkan tipe *stakeholders*, mereka adalah (1) duta digital sebagai *discretionary stakeholders*; (2) masyarakat desa/ masyarakat lokal sebagai *demanding stakeholders*; (3) perangkat desa sebagai *dominant stakeholders*; (4) PKK dan (5) kader digital sebagai *dependent stakeholders*; (6) bumdes (7) kepala dusun dan (8) BPD sebagai *definitive stakeholders*.

Agen 1 adalah fasilitator yang ditunjuk oleh Kementerian Desa melalui proses seleksi nasional. Agen 1 menjabat sebagai Duta Digital selama periode tahun 2022-2024. Meski bukan termasuk warga asli Desa Kertagena Tengah, ia menjadi salah satu tokoh sentral dan penting dalam program Desa Cerdas. Ia memiliki *power* untuk berkomunikasi

dengan kader digital maupun dengan perangkat desa, khususnya dalam menentukan jenis program, pelaksanaan dan evaluasi. Pengelolaan dana dari Kementerian Desa melibatkan fasilitator. Agen memiliki kemampuan dalam TIK, termasuk dalam pengelolaan website desa.

Agen 2 masyarakat desa atau masyarakat lokal penerima manfaat program. Peneliti mengajak 10 perwakilan masyarakat dalam kelompok diskusi. Seluruh agen yang terlibat dalam kelompok diskusi telah memanfaatkan *smartphone*. Berdasarkan hasil wawancara, agen memiliki pemaknaan yang terbatas tentang program Desa Cerdas. Mereka hadir pada saat kegiatan dan tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut menyebabkan keberlanjutan program disangsikan.

Agen 3 perangkat desa sebagai kelompok dominan dalam program Desa Cerdas. Kelompok ini bertindak sebagai penyelenggara program. *Power* dan legitimasi yang dimiliki agen cukup besar dalam menentukan jenis program dan pelaksanaan. Agen ini memberikan arahan, bentuk persetujuan atau penolakan terhadap ide atau gagasan program. Setiap pelaksanaan dan bentuk kegiatan, berjalan atas sepengetahuan dan izin agen 3. Agen telah mengadopsi *smartphone* dan menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.

Agen 4 adalah kader PKK. Dalam program Desa Cerdas, peran agen tidak signifikan terlihat. Agen memosisikan diri sebagai peserta pelatihan dan sekadar hadir pada saat kegiatan.

Agen 5 ialah kader digital. Peran agen ini juga bergantung pada *stakeholder* lainnya. Agen terpilih karena ditunjuk oleh perangkat desa dan menjabat selama periode tahun 2022-2024. Agen memiliki kedekatan dengan kelompok masyarakat, duta digital, dan perangkat desa. Agen sebagai pihak ketiga, menjembatani komunikasi antar *stakeholders*. Kader digital digadang-gadang dapat meneruskan program, setelah masa kerja duta digital selesai. Agen memiliki kecakapan dalam pemanfaatan teknologi, seperti media sosial, digital marketing, dan audio visual.

Agen 6 ialah Bumdes. Kelompok ini terlibat dalam program Desa Cerdas untuk meningkatkan UMKM. Bumdes memberdayakan masyarakat. Jika ada kelompok masyarakat yang memiliki produk UMKM, maka Bumdes membantu memberikan arahan dan saran. Bumdes juga membantu pengurusan sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) desa Kertagena Tengah. Bumdes menjadi peserta program dan membantu menginput produk-produk UKMM di *website* desa.

Agen 7 adalah kepala dusun. Berdasarkan analisis *stakeholders*, kepala dusun adalah agen yang dianggap paling dekat dengan masyarakat lokal. Hal itu, melihat dari pola interaksi dan informasi yang diberikan. Berkaitan dengan program Desa Cerdas, kepala dusun terlibat dalam pemilihan peserta kegiatan.

Agen 8 adalah BPD. Sama halnya dengan kader PKK, peran BPD dalam program Desa Cerdas bersifat terbatas. BPD menjadi peserta kegiatan dan tidak terlibat secara langsung dalam hal penentuan dan jenis program.

## 2. **Tata Kelola Program Desa Cerdas**

Secara teori, tata kelola program Desa Cerdas merujuk pada struktur, yaitu aturan dan sumber daya. Tata kelola program Desa Cerdas berjalan secara struktural dan hierarkis. Pertama, pemerintah pusat menunjuk Duta Digital daerah melalui proses rekrutmen nasional. Keberadaan Duta Digital berperan penting dalam mengelola program bersama-sama dengan Kader Digital. Kader Digital menggerakkan masyarakat. Kader memilih dan mengundang peserta program. Kader juga menjadi penengah antara penyelenggara program dan masyarakat. Kader Digital memiliki potensi menghidupkan ruang diskusi dengan masyarakat, terutama dalam menentukan jenis dan prioritas program.

Kedua, pelaksanaan program sangat bergantung pada agenda administrasi dari pusat. Sebagaimana diketahui, desa Kertagenah Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten

Pamekasan terpilih sebagai Desa Cerdas berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penetapan 1000 Desa Lokasi Desa Cerdas Fase II (Kemendesa, 2022). Dibutuhkan waktu satu tahun untuk seleksi dan penetapan Duta Digital. Duta Digital sebagai fasilitator desa dilantik pada tahun yang sama yaitu, bulan Juli tahun 2022. Keberadaan Duta Digital dan program Desa Cerdas setidaknya berlaku selama dua tahun.

Program baru berjalan satu tahun kemudian, tepatnya pada bulan April 2023. Kegiatan pertama dalam bentuk launching *website* desa & layanan mandiri warga. Adapun dana pemerintah pusat untuk mendukung produktivitas masyarakat berjalan berangsur-angsur. Dari hasil wawancara dengan penyelenggara program, dana yang harus dihabiskan sekitar 20 juta setiap tahunnya. Tahun 2023, dana pemerintah cair sepuluh juta menghasilkan program pelatihan Desain Produk dan Digital Marketing. Selanjutnya, pada bulan September dan Desember 2023, pelatihan kemasan produk, pelatihan foto produk, dan digital marketing. Baru pada Mei 2024 program pelatihan terakhir dilaksanakan, yaitu pelatihan pemanfaatan *website*.

Dari poin di atas dapat terlihat, administrasi pusat berjalan selama satu tahun. Sisanya adalah pelaksanaan program. Partisipasi menjadi sulit dilakukan karena waktu yang terbatas. Program seolah-olah “dikejar waktu”, sehingga proyek pembangunan terkesan sekadar menghabiskan anggaran. Fenomena ini sering terjadi secara terus-menerus, dan stigma yang melekat pada pelaksanaan program pemerintah.

Desa Cerdas tidak jauh berbeda dengan kebanyakan program pemerintah, misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Berdasarkan penelitian Roitman (2016), proses tata kelola PNPM tidak dapat didefinisikan sebagai *top-down* maupun *bottom-up*. Program menggunakan sistem pemerintahan campuran dengan menggabungkan kedua strategi tersebut. Ada keterbatasan yang signifikan dalam prosesnya karena pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang besar. Hal itu berkaitan dengan apa yang perlu dikembangkan di masyarakat. Program pembangunan belum berbasis masyarakat.

Paradigma dominan sering kali gagal mempertimbangkan pengalaman ekonomi, budaya, atau politik dari "subjek" dan mereduksi komunikasi menjadi proses satu arah dari atas ke bawah (Chitranshi & Dhar, 2018). Hal itu didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, bagaimana Beltrán (2008) mempertanyakan teori dan praktik komunikasi pembangunan di Amerika Latin. Schiller (2018) menyoroti negara-negara maju monodominasi aliran informasi global dan mengendalikan media internasional. Dallas Walker Smythe juga menunjukkan keprihatinan, bagaimana ketergantungan Tiongkok pada Barat telah beralih ke kapitalisme (Zhao & Hong, 2023). Senada dalam temuan penelitian ini, program Desa Cerdas yang berjalan secara *top-down* juga memiliki kelemahan.

Di Indonesia, pergeseran pendekatan dalam konteks pembangunan dapat dilihat pasca orde baru. Miller dalam (Roitman, 2016) menyebutkan, setelah era presiden Soeharto, pembangunan di Indonesia fokus pada desentralisasi. Memberikan tanggungjawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, pelimpahan tersebut menyebabkan adanya kesenjangan kemajuan yang tidak merata antara provinsi, kota dan kabupaten. Pengaruh pemimpin elit dipercaya memiliki peranan penting. Hubungan hierarki dalam pemerintahan masih melekat erat, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menciptakan peluang kemandiriannya. Dampak sisi lainnya dari desentralisasi, pergeseran desain dan implementasi program pembangunan yang lebih bersifat *bottom-up*. Masyarakat di daerah “memiliki panggung” untuk bersuara dan terlibat dalam perencanaan program, serta penetapan program prioritas berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan kata lainnya lebih bersifat partisipatif.

Sebenarnya meski tergolong proyek modernis, program Desa Cerdas berupaya mendekati aspek partisipatif. Daerah dapat menguraikan kebutuhan dan usulan program prioritas kepada pusat. Pembentukan Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD) sebagai upaya sadar kepada masyarakat. Tujuannya menjalankan program secara mandiri dan mendukung keberlanjutan program.

Selanjutnya, penting untuk diketahui, pembangunan program Desa Cerdas lebih mengutamakan pada aspek digital. Tujuan yang ingin dicapai ialah literasi digital. Masyarakat dengan penggunaan *smartphone*, dapat memiliki bekal yang cukup dalam memahami teknologi digital. Kegiatan ini pun melekat dengan aktivitas pemanfaatan teknologi. Semua program yang dilaksanakan di Desa Kertagena Tengah menyentuh aspek teknologi.

Teori AST melihat bagaimana *stakeholders* menafsirkan dan menggunakan TIK untuk mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan hasil temuan peneliti, penyelenggara memanfaatkan peluang TIK untuk mendukung literasi digital. Menjadi tanda tanya selanjutnya, apakah program yang dilaksanakan sudah mendukung tujuan tersebut? Karena faktanya, pemerintah memaknai literasi digital sebagai pemanfaatan teknologi semata. Dari hasil temuan, penyelenggara memiliki gagasan bahwa program pelatihan desain kemasan produk bisa menggunakan aplikasi Canva, atau foto produk dengan *smartphone*, digital marketing menggunakan media sosial, ataupun penulisan konten *website* dan media sosial dengan bantuan chat GPT.

Sejak awal, tujuan program terbatas pada pemanfaatan tanpa melihat situasi masyarakat. Jika kita menarik lensa di Desa Kertagena Tengah, tujuan program Desa Cerdas adalah dalil yang diperkenalkan elit kepada masyarakat. Pendapat penyelenggara program, fokus Desa Cerdas ialah peningkatan kapasitas warga dan peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi. Padahal lebih dari pada itu, tonggak literasi digital adalah penguasaan ide bukan hanya keterampilan menggunakan komputer dan teknologi informasi semata (Leaning, 2019). Lalu, menjadi pertanyaan, apakah tujuan tersebut sudah diformulasikan dalam program Desa Cerdas? Mengingat dari tujuan program saja, pemerintah menekankan pada literasi digital tanpa melihat situasi masyarakat desa seperti apa.

Erstad *et al.* dalam (Laturrahmi & Fliert, 2023) menyebutkan, literasi digital bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis. Lebih jauh, literasi digital melibatkan kemampuan mengelola beragam tipe komunikasi, yaitu teks, grafis, auditori dan lainnya. Secara mendetail Peng & Yu dalam (Laturrahmi & Fliert, 2023), literasi digital menyangkut kemampuan menggunakan, memanfaatkan, membuat konten, membagikan, mengevaluasi TIK dan internet secara efektif dan kritis. Tujuannya lebih kompleks, yaitu akses informasi, komunikasi, kolaborasi, pemecah masalah, dan penyelesaian tugas. Keterampilan literasi digital bersifat luas dan sering dimaknai dengan kemampuan plural atau majemuk.

Berbicara literasi digital tidak hanya memanfaatkan teknologi. Digital literasi memiliki implikasi, masyarakat dapat mengakses informasi, menggunakan komunikasi digital dengan baik dan benar, melindungi privasi, data dan hak-hak lainnya. Literasi digital haruslah mendukung kreativitas, peluang kolaborasi secara digital dan memecahkan masalah.

### 3. *Desa Cerdas Secara Makro*

Desa Cerdas sebagai program inisiatif negara oleh Kemendesa memang bersifat *top-down*. Namun disisi lain, berdasarkan hasil FGD bersama masyarakat desa di Desa Kertagena Tengah, masyarakat menginginkan program-program pemerintah, yang dalam hal ini melalui pemerintah desa, mendukung partisipatoris. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bahkan pengembangan. Disisi lainnya, untuk melakukan perubahan sosial dan pembangunan harus menyentuh aspek

partisipatif masyarakat lokal. Para ahli juga sudah mengatakan, seperti misalnya Freire (1970), Wilkins & Mody (2001), Jacobson (2003), Servaes & Malikhao (2005), Srampickal (2006), Servaes (2008), Tufte & Mefalopulos (2009), S. Melkote & Steeves (2015), Chitranshi & Dhar (2018).

Pendekatan partisipatif dapat mendukung perubahan yang lebih berkelanjutan, perilaku dan kontribusi terhadap pembangunan dari *stakeholders*, serta adanya *sense of belonging* dalam pembangunan. Program pembangunan lebih mungkin untuk berkelanjutan karena mereka didasarkan pada kebutuhan dan keinginan nyata dari komunitas (Srampickal, 2006). Mereka merasa memiliki program tersebut dan lebih berkomitmen untuk memastikan keberhasilannya. Selain itu, program yang dikembangkan melalui komunikasi partisipatif akan lebih adaptif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan lokal.

Wacana yang disebutkan di atas menjadi penting, karena adanya aspek-aspek lemah yang disebutkan oleh narasumber dalam penelitian ini. Kurangnya dialog dan masyarakat tidak diberikan panggung termasuk dalam pengambilan keputusan. Belum ada kegiatan yang mendorong dialog untuk merumuskan program, evaluasi sampai pengembangan. Pertama, program pembuatan *website* untuk mendukung administrasi digital desa. Agenda buka bersama pada tahun 2023 telah berjalan. Kegiatan dalam bentuk sosialisasi program Desa Cerdas dengan nama kegiatan “Launching *Website* Desa & Layanan Mandiri Warga”.

Selanjutnya, sosialisasi memperkenalkan *website* desa. Selain itu adanya layanan permohonan surat-menyurat mandiri secara online melalui *website*. Faktanya sepanjang tahun 2023 berjalan, pihak penyelenggara mengakui *website* tidak berjalan terlalu aktif, oleh karena itu muncul pelatihan pengelolaan *website* yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024. Masyarakat lokal juga menjadi peserta dalam pelatihan tersebut. Dari hasil wawancara menunjukkan, bahwa masyarakat belum merasakan manfaat *website* desa secara penuh.

Elit melakukan internalisasi nilai-nilai dominan melalui media. Masyarakat menerima dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma tanpa menyadarinya. Sebagaimana diketahui, permohonan surat-menyurat online dianggap berbenturan dengan budaya *namoy/ bertamu* (silaturahmi). Selama ini, budaya *sowan* (silaturahmi) memang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Elit beranggapan, jika surat-menyurat *online* dilanjutkan, dikhawatirkan Balai Desa akan sepi dan tidak dikunjungi warga, serta warga tidak dapat bertemu dengan perangkat desa.

Program Desa Cerdas belum menjawab kebutuhan masyarakat desa. Salah satu perwakilan kelompok masyarakat turut mempertanyakan eksistensi *website* desa bagi masyarakat. Fasilitas layanan surat menyurat online belum aktif. Bahkan sampai saat ini, layanan administrasi mandiri yang digaungkan tidak pernah berjalan. Kehadiran media dan komunikasi seharusnya tidak sekadar dipandang sebagai sarana untuk mencapai perubahan, tetapi juga mempersoalkan kekuasaan (*power*) dan relasinya dengan berbagai aspek untuk mencapai perubahan (Laturrakhmi & Fliert, 2023).

Keputusan dan program pembangunan sering kali ditentukan oleh pihak luar tanpa melibatkan komunitas lokal (Srampickal, 2006). Fakta ini juga peneliti temukan pada hasil FGD. Elit memiliki keyakinan, *website* merupakan bagian dari tata kelola cerdas, yang merupakan salah satu pilar Desa Cerdas. Salah satu narasumber mengatakan, ide pembuatan *website* tidak melibatkan partisipasi masyarakat, karena bagian dari pilar tata kelola Desa Cerdas sehingga hanya dengan perangkat desa. Menurut elit, media digital tersebut dianggap pasti memberikan manfaat kepada masyarakat. Ideologi ini sangat modernis mengacu pada pemikiran imperialisme barat. Penyebaran budaya digital global dan dominasi teknologi media digital dapat melanggengkan asimetri kekuasaan dan

hierarki budaya mengingatkan kita pada struktur kolonial (Kumar & Parameswaran, 2018).

*Power* dari kementerian pusat dalam menjalankan kebijakan besar strategis nasional, juga bersinggungan dengan partisipasi politiknya. Peneliti De Zúñiga et al., (2019) menunjukkan, bahwa meskipun perilaku komunikasi individu sangat penting, konteks masyarakat yang lebih luas, khususnya kebebasan untuk mengekspresikan diri dan independensi pers, secara signifikan memengaruhi hubungan antara komunikasi dan partisipasi politik. Peneliti menekankan pentingnya norma demokratis dan kebebasan pers dalam mendorong keterlibatan politik. Mereka berharap bahwa di negara-negara dengan tingkat kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang lebih tinggi, seperti halnya Indonesia yang menganut sistem demokrasi, hubungan antara penggunaan berita, diskusi politik, dan partisipasi politik akan lebih kuat. Hal itu karena faktor-faktor tingkat makro dianggap memfasilitasi lingkungan tempat warga negara dapat mengakses informasi secara bebas, terlibat dalam diskusi, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Aspek berikutnya, program Desa Cerdas berjalan pada periode dan rezim tertentu. Sudah ada peneliti yang mengkaji adanya kemunduran demokrasi di Indonesia selama masa jabatan Presiden Jokowi (Asrinaldi & Yusoff, 2023). Peneliti Asrinaldi dan Yusoff menyoroti melemahnya masyarakat sipil, konflik dalam masyarakat politik, politisasi birokrasi negara, dan ketergantungan masyarakat ekonomi pada pemerintah sebagai faktor-faktor utama dalam kemunduran demokrasi. Keterlibatan mendalam pemerintah Indonesia dalam proses demokrasi, menyebabkan kemunduran sistematis fungsi elemen-elemen demokrasi. Hal itu memengaruhi konsolidasi demokrasi bangsa dan berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga negara seperti halnya Kemendes.

Berikutnya, pemanfaatan teknologi di Desa Cerdas bersifat terarah. Berdasarkan kebijakan, penerima manfaat program Desa Cerdas adalah masyarakat desa. Wilkins (1999) mengatakan, komunikasi pembangunan bukan hanya memanfaatkan kecanggihan teknologi, tetapi esensial tentang pengetahuan dan praktik-praktik masyarakat. Peneliti memiliki keyakinan, program Desa Cerdas menjadi prediktor menguatnya pendekatan-pendekatan yang sentralistik dan terpusat. Masyarakat diposisikan sebagai subjek. Menggaungnya model-model lama di mana *power* terpusat di elit, menyebabkan suara-suara kelompok masyarakat terabaikan.

McChesney dalam (Splichal & Mance, 2018) menjelaskan, media melayani kelompok dominan dibandingkan kepentingan masyarakat secara universal. *Website* dimunculkan oleh elit untuk mendukung kepentingannya. *Website* desa tidak ubahnya seperti media massa pada era modernis, yang erat kaitannya dengan kepemilikan media itu sendiri. Gramsci dalam Adamson (1980), menyertakan media sebagai bagian dari arena ideologi. *Website* Desa tidak lebih dari serangkaian aktivitas dari penyelenggara program.

*Website* desa akan lebih bermakna jika mampu mendorong partisipasi masyarakat. Srampickal (2006) menyebutnya sebagai metodologi media komunitas berbasis interaktivitas. Media tradisional sebagai instrumen operasionalnya, namun memungkinkan perolehan pengetahuan dan keterampilan endogen dalam kerangka pencarian solusi dan proses komunikasi.

#### 4. *Dualitas Struktur Program Desa Cerdas*

Sebagaimana peneliti sampaikan sebelumnya, teori strukturasi adaptif menunjukkan bagaimana terjadinya hubungan timbal balik antara agen dan struktur. Hubungan tersebut menciptakan dialog, negosiasi dan artikulasi yang cenderung dinamis dan bersifat cair. Konsep tersebut mengacu pada pendekatan poststrukturalis. Gagasan ini menolak makna bersifat tetap dan menekankan makna hasil proses sosial terus berubah.

Ada beberapa entitas dalam program Desa Cerdas. Entitas tersebut bergerak ke arah yang lebih dinamis. Pertama, program Desa Cerdas memang bersifat terarah dan

tujuan program telah ditentukan sebelumnya. Namun, disisi lain, daerah memiliki wewenang untuk menentukan jenis program dan prioritas program berdasarkan kebutuhan masyarakat. Prioritas program telah tersaji di bab IV. Agen dengan kapasitasnya bertindak dalam struktur. Mereka mengikuti aturan yang ada. Agen juga mereproduksi struktur melalui tindakan mereka.

Entitas tidak sekadar struktur dan agen yang sifatnya biner, hanya tata kelola program Desa Cerdas (dalam hal ini Kemendesa) dan kelompok masyarakat. Dari hasil wawancara FGD, terbentuk kelompok untuk menciptakan struktur baru. Meski pendanaan dari pusat selesai di tahun 2024, perangkat desa berkomitmen mendukung keberkelanjutan dengan dana desa. Kegiatan untuk mendukung literasi digital. Agen lainnya kader digital dengan kemampuan TIK memiliki antusiasme menggerakkan RKDD. Idenya adalah menggabungkan gagasan Klinik UMKM dan RKDD. Klinik UMKM untuk melayani kelompok masyarakat yang ingin mengetahui cara meningkatkan penjualan atau cara modal desain kemasan. Di sisi lain, masyarakat memiliki minat dan perhatian pada program Desa Cerdas selanjutnya. Dengan demikian, elit dari Kementerian Desa tidak selalu menjadi agen dominan dalam komunikasi pembangunan.

Kekuasaan menyebar dari para agen. Proses negosiasi secara terus menerus. Fenomena strukturasi yang disebutkan menunjukkan adanya *network* (jaringan) yang esensinya adalah kesejahteraan (*wellbeing*). Giddens memang tidak secara eksplisit menggunakan istilah "*wellbeing*" sebagai konsep utama dalam teorinya. *Wellbeing* dapat dimaknai sebagai interaksi dinamis antara struktur dan agen yang memengaruhi kehidupan sosial dan individu. Corman dan Scott dalam (Canary & Tarin, 2017) menjelaskan, jaringan sebagai serangkaian aturan dan sumber daya (struktur) yang digunakan orang untuk terhubung dengan orang lain. Ada hubungan timbal balik antara struktur jaringan dan tindakan saat agen (yang terhubung oleh aturan dan sumber daya jaringan) menghasilkan dan mereproduksi struktur.

*Wellbeing* tersebut bisa tercapai ketika agen di memiliki hubungan sosial yang mendukung, sumber daya dan fasilitas yang memadai, serta partisipasi dari anggotanya (Giddens, 1984). Dalam konteks desa Kertagena Tengah, *wellbeing* dilihat dari persamaan minat dan kepentingan agen untuk pemberdayaan masyarakat. Perangkat desa menyediakan fasilitas pendanaan dan tempat kegiatan. Kader digital dengan kemampuannya membuka peluang informasi dan kolaborasi melalui RKDD. Begitupun dengan masyarakat, telah memiliki kesadaran berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari fenomena fungsionalis modernis melalui program Desa Cerdas. Peneliti melakukan evaluasi terhadap program Desa Cerdas di Kertagena Tengah dengan perpektif teori strukturasi adaptif. Kajian penelitian berada di payung komunikasi pembangunan dengan pendekatan poststrukturalis. Penelitian menjelaskan pengalaman dan pemahaman masyarakat desa tentang program Desa Cerdas di Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya, mengidentifikasi program Desa Cerdas di Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan dapat dibuat berdasarkan prinsip komunikasi partisipatif.

Temuan peneliti menunjukkan tata kelola program Desa Cerdas berjalan secara struktural dan hierarkis. Ada keterbatasan dalam proses pelaksanaan karena pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang besar. Duta digital sebagai fasilitator ditentukan oleh pusat. Proses administrasi pusat terlalu lama dengan periode pelaksanaan hanya selama dua tahun. Hal itu menyebabkan, program efektif berjalan satu tahun saja. Program yang sudah dilaksanakan, yaitu program pelatihan desain kemasan produk & pengurusan izin UMKM, pelatihan foto produk, pelatihan digital marketing, dan pelatihan pemanfaatan *website*.

Poin selanjutnya adalah kegiatan menggerakkan masyarakat bergantung pada pendanaan pusat. Tujuan program, yaitu literasi digital telah ditentukan sebelumnya tanpa melihat kondisi di masyarakat. Juga kelemahan kurangnya dialog dan masyarakat tidak diberikan panggung termasuk dalam pengambilan keputusan. Aturan dan sumber daya berlangsung secara *top-down*. Power menjadi modalitas dalam struktur (program Desa Cerdas oleh Kemendes).

Aspek-aspek yang disebutkan di atas cenderung lemah karena dalam komunikasi pembangunan, partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan. Perilaku kontribusi dari awal, mulai dari pembahasan, pelaksanaan, evaluasi sampai pengembangan program. Meski ada keterbatasan dalam kebijakan, program Desa Cerdas berupaya mendekati aspek partisipatif. Daerah dapat menguraikan kebutuhan dan usulan program prioritas kepada pusat. Pembentukan Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD) sebagai sarana mendukung kreativitas masyarakat dan menghidupkan ruang diskusi.

Agen memiliki peluang menyesuaikan, mengubah atau memodifikasi cara program dilaksanakan di masa mendatang sesuai konteks lokal mereka. Hal itu sesuai dengan pendekatan poststrukturalis, ada dualitas struktur yang bekerja dalam program Desa Cerdas. Posisi pemerintah menjadi salah satu entitas, bukan lagi dominan. Ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok, struktur baru dalam program Desa Cerdas.

## REFERENSI

- Adamson, W. L. (1980). *Hegemony and Revolution Antonio Gramsci's Political and Cultural Theory*. University of California Press.
- Antoni. (2004). *Riuhnya Persimpangan Itu: Profil dan Pemikiran Para Penggagas Kajian Ilmu Komunikasi*. Tiga Serangkai.
- Asrinaldi, & Yusoff, M. A. (2023). Power consolidation and its impact on the decline of democracy in Indonesia under President Jokowi. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2232579>
- Beltrán, L. R. (2008). Development Communication: Latin America. *The International Encyclopedia of Communication*. <https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbiecd024>
- Canary, H. E., & Tarin, C. A. (2017). Structuration Theory. *The International Encyclopedia of Organizational Communication*, 1–15. <https://doi.org/10.1002/9781118955567.wbieoc197>
- Chitranshi, B., & Dhar, A. (2018). Rethinking Development Communication. *Oxford Research Encyclopedia of Communication*, 1–24. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.618>
- De Zúñiga, H. G., Diehl, T., Huber, B., & Liu, J. H. (2019). The citizen communication mediation model across countries: A multilevel mediation model of news use and discussion on political participation. *Journal of Communication*, 69(2), 144–167. <https://doi.org/10.1093/joc/jqz002>
- DeSanctis, G., & Poole, M. S. (1994). Capturing the Complexity in Advanced Technology Use: Adaptive Structuration Theory. *Organization Science*, 5(2), 121–147. <https://doi.org/10.1287/orsc.5.2.121>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of The Oppressed*. Herder & Herder.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society*. University of California Press.
- Handayani, S., Alfira, N., Rokhman, L. N., & Inayah, E. (2015). Komunikasi Pembangunan di Indonesia: Telaah Pemikiran M. Alwi Dahlan & Santoso S. Hamijoyo. *Imagining E-Indonesia: Local Wisdom in The Midst of Media Technology and Communication Policy*, 53(9), 1689–1699.
- Hemer, O., & Tuftte, T. (2012). ComDev in the Mediatized World. *Nordicom Review*, 33(2012), 229–237. <https://doi.org/10.2478/nor-2013-0038>
- Herington, M. J., van de Fliert, E., Smart, S., Greig, C., & Lant, P. A. (2017). Rural energy planning remains out-of-step with contemporary paradigms of energy access and development. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 67(September 2015), 1412–1419. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.103>
- Jacobson, T. L. (2003). Participatory Communication for Social Change: The Relevance of the Theory of Communicative Action. *Annals of the International Communication Association*, 27(1), 87–123. <https://doi.org/10.1080/23808985.2003.11679023>

- Kemendesa. (2022). *Surat Keputusan Penetapan Desa Cerdas Fase II Tahun 2022*. [https://www.kemendesa.go.id/berita/assets/files/SK\\_Penetapan\\_Desa\\_Cerdas\\_Fase\\_II\\_Tahun\\_20221.pdf](https://www.kemendesa.go.id/berita/assets/files/SK_Penetapan_Desa_Cerdas_Fase_II_Tahun_20221.pdf)
- Khumalo, L. S. (2021). the Role of Participatory Development Communication in Social Cohesion: the Case of Masibumbane Listeners' Club. *Communitas*, 26, 70–85. <https://doi.org/10.18820/24150525/Comm.v26.5>
- Kraidy, M. M. (2018). Global Media Studies: A Critical Agenda. *Journal of Communication*, 68(2), 337–346. <https://doi.org/10.1093/joc/jqx024>
- Kumar, S., & Parameswaran, R. (2018). Charting an Itinerary for Postcolonial Communication and Media Studies. *Journal of Communication*, 68(2), 347–358. <https://doi.org/10.1093/joc/jqx025>
- Laturrakhmi, Y. F., & Fliert, E. van de. (2023). Komunikasi untuk Perubahan Sosial dalam Konteks Indonesia. In F. H. Oktaviani, Y. F. Laturrakhmi, & E. van de Fliert (Eds.), *Komunikasi untuk Perubahan Sosial dalam Konteks Indonesia* (Pertama, p. 2). UB Press. <https://play.google.com/books/reader?id=4FH3EAAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=en>
- Leaning, M. (2019). An approach to digital literacy through the integration of media and information literacy. *Media and Communication*, 7(2 Critical Perspectives), 4–13. <https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1931>
- Melkote, S. R., & Singhal, A. (2021). *Handbook of Communication and Development*. Edward Elgar Publishing.
- Melkote, S., & Steeves, H. L. (2015). Place and role of development communication in directed social change: a review of the field. *Journal of Multicultural Discourses*, 10(3), 385–402. <https://doi.org/10.1080/17447143.2015.1050030>
- Moore, J. (2017). Where Is the Critical Empirical Interpersonal Communication Research? A Roadmap for Future Inquiry into Discourse and Power. *Communication Theory*, 27(1), 1–20. <https://doi.org/10.1111/comt.12107>
- Morris, N. (2003). A comparative analysis of the diffusion and participatory models in development communication. *Communication Theory*, 13(2), 225–248. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2003.tb00290.x>
- Mumby, D. K. (1997). Modernism, postmodernism, and communication studies: A rereading of an ongoing debate. *Communication Theory*, 7(1), 1–28. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.1997.tb00140.x>
- Rogers, E. M. (1978). The Rise and Fall of the Dominant Paradigm. *Journal of Communication*, 28(1), 64–69. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1978.tb01564.x>
- Roitman, S. (2016). Top-Down and Bottom-Up Strategies for Housing and Poverty Alleviation in Indonesia: The PNPM Programme in Yogyakarta. In *Dynamic and Resilience of Informal Areas* (p. 187). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-29948-8\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-319-29948-8_11)
- Schiller, H. I. (2018). *Communication and Cultural Domination*. Routledge.
- Servaes, J. (2008). Communication for development and social change. In *Communication for Development and Social Change* (Issue February). <https://doi.org/10.4135/9788132108474>
- Servaes, J., & Malikhao, P. (2005). *Participatory Communication: The New Paradigm*.
- Shah, H. (2011). *The Production of Modernization: Daniel Lerner, Mass Media, and The Passing of Traditional Society*. Temple University Press.
- Singhal, A. (1987). *Wilbur Schramm: Potrait of d Development Communication Pioneer*. [https://utminers.utep.edu/asinghal/articles\\_and\\_chapters/singhal-wilbur\\_schramm-communicator.pdf](https://utminers.utep.edu/asinghal/articles_and_chapters/singhal-wilbur_schramm-communicator.pdf)
- Singhal, A., & Rogers, E. M. (1999). *Entertainment\_Education: A Communication Strategy for Social Change*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Splichal, S., & Mance, B. (2018). Paradigm(s) Lost? Islands of Critical Media Research in Communication Journals. *Journal of Communication*, 68(2), 399–414. <https://doi.org/10.1093/joc/jqx018>
- Srampickal, J. (2006). Development and Participatory Communication. *Communication Research Trends*, 25 no. 2(2), 1–43. <http://cscs.scu.edu>
- Stover, W. J. (2018). *Information Technology In The Third World: Can IT Lead to Human National Development?* Taylor & Francis.
- Tufte, T., & Mefalopulos, P. (2009). *Perticipatoty Communication: A Practical Guide*.

<https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8008-6>

White, R. A. (2004). Is 'Empowerment' the Answer? *Gazette (Leiden, Netherlands)*, 66(1), 7–24.

<https://doi.org/10.1177/0016549204039939>

Wilkins, K. G. (1999). Development discourse on gender and communication in strategies for social change. *Journal of Communication*, 49(1), 46–68. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02781.x>

Wilkins, K. G., & Mody, B. (2001). Reshaping development communication: Developing communication and communicating development. *Communication Theory*, 11(4), 385–396. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2001.tb00249.x>

Zhao, Y., & Hong, Y. (2023). Communication, technology and development at a critical juncture: revisiting Dallas Smythe in China. *Chinese Journal of Communication*, 16(4), 351–358. <https://doi.org/10.1080/17544750.2023.2285974>